

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauhmana fungsi-fungsi standar biaya khusus dalam penganggaran di BPOM. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan standar biaya khusus, diharapkan dapat memberikan penjelasan berkaitan sejauhmana fungsi standar biaya khusus dalam penganggaran. Dalam tahap selanjutnya diharapkan diperoleh gambaran tentang alternatif-alternatif pengembangan atau penyempurnaan standar biaya khusus yang diarahkan agar standar biaya khusus di BPOM dapat berkembang sejalan dengan perbaikan informasi biaya.

5.1.1. Efektivitas penerapan kebijakan standar biaya khusus

Pada tingkat satuan kerja dan program terdapat perbedaan yang signifikan realisasi anggaran antara sebelum dan sesudah menerapkan standar biaya khusus. Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat satuan kerja dan program, penerapan kebijakan standar biaya khusus efektif karena baik berdasarkan data realisasi anggaran maupun pengujian secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan.

Pada tingkat kegiatan tidak terdapat perbedaan yang signifikan realisasi anggaran antara sebelum dan sesudah menerapkan standar biaya khusus, meskipun secara nominal terdapat kenaikan penyerapan anggaran per kegiatan pada tahun 2007 sebesar 86,72% menjadi 92,60% pada tahun 2008, namun secara statistik kenaikan ini tidak signifikan.

5.1.2. Efektivitas standar biaya khusus sebagai prasyarat anggaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat dan signifikan terkait dengan persepsi responden mengenai efektivitas standar biaya khusus sebagai prasyarat untuk mendapatkan anggaran. Namun demikian persepsi responden ini tidak sejalan dengan teori *activity based costing* sebagai pendekatan dalam penyusunan standar biaya. Hal ini ditunjukkan dengan arah korelasi yang bertanda negatif.

Korelasi yang bertanda negatif dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya standar biaya khusus sebagai dasar pengalokasian anggaran. Namun di sisi lain identifikasi melalui standar biaya khusus pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan keputusan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah pagu. Hal ini dapat ditemukan dalam praktek penganggaran di Indonesia bahwa penentuan masalah pagu bukan domain eksekutif melainkan hasil komunikasi dengan legislatif. Oleh karena itu standar biaya khusus sebagai alat untuk menentukan kebutuhan indikasi anggaran pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan keputusan anggaran.

Pendekatan Thompson-Tuden Matrix dapat digunakan untuk menyusun standar biaya khusus, berdasarkan pendekatan ini pengujian sampel diklasifikasikan sebagai kegiatan yang dapat diformulasikan, karena pengujian sampel obat, makanan, obat tradisional dan produk kemasan rumah tangga merupakan program dan kegiatan utama Badan POM dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah. Di samping itu penentuan standar biaya khusus harus memperhatikan ruang lingkup kegiatan, sifat kegiatan, dan kompleksitas kegiatan. Jenis keluaran *non-tangible ideal services*, tidak memiliki standar seperti koordinasi dan rekomendasi kebijakan. Di samping itu dikaitkan dengan *activity based costing* bahwa penerapannya memerlukan lingkungan yang stabil. Apabila

terdapat struktur biaya berubah, dan komposisi output yang berubah, maka praktek penerapan *activity based costing* akan menjadi sulit dipertahankan.

5.1.3. Efektivitas standar biaya khusus sebagai alat penganggaran

Terdapat korelasi erat antara persepsi responden tentang standar biaya khusus sebagai alat untuk menyusun anggaran dengan realisasi anggaran, namun arahnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi responden terhadap aspek kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan standar biaya sebagai alat untuk menyusun anggaran meskipun belum terwujud. Penggunaan standar biaya dalam menyusun anggaran memerlukan dukungan program aplikasi yang lebih baik, ditinjau dari aspek kemampuan beradaptasi dengan pengguna, intensitas penggunaan sumber daya termasuk kesederhanaan pelaksanaan dan biaya administrasi agar membantu proses penyusunan anggaran.

5.1.4. Efektivitas standar biaya khusus sebagai pedoman dan informasi biaya kegiatan

Terdapat korelasi kuat dan signifikan terkait dengan persepsi responden mengenai efektivitas standar biaya khusus sebagai alat yang menunjukkan perbaikan cara kerja dan informasi biaya suatu kegiatan, namun arahnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman standar biaya bersifat kaku oleh karena itu disarankan agar dalam pelaksanaannya tidak diatur secara rinci karena menginginkan fleksibilitas. Dalam perspektif pendekatan *activity based costing* penerapan standar biaya khusus memerlukan lingkungan yang stabil. Persoalannya adalah lingkungan tidak stabil, oleh karena itu diperlukan penyesuaian mengingat sifat anggaran yang tidak sempurna dan berdimensi beragam.

5.2. Saran

5.2.1. Pengembangan standar biaya khusus

Dalam lingkungan tidak stabil, sifat anggaran yang tidak sempurna dan berdimensi beragam, pengembangan standar biaya khusus diarahkan kepada: (i) kegiatan dengan ruang lingkup yang terbatas, karakteristik kaku dan kompleksitas kegiatan yang rendah, (ii) kegiatan dengan ruang lingkup yang terbatas, karakteristik longgar (fleksibel) dan kompleksitas kegiatan yang tinggi.

Kriteria tersebut digunakan untuk menginventarisasi kegiatan, menentukan variasi atau klasifikasi kegiatan kemudian menetapkan pilihan-pilihan jenis kegiatan yang dapat disusun standar biaya. Di dalam menetapkan pilihan tersebut harus memastikan keseragaman proses pelaksanaan kegiatan. Penetapan *costing* didukung dengan ketersediaan data, seperti data realisasi kegiatan yang pernah dilaksanakan. Sedangkan penetapan rincian aktivitas harus mampu menunjukkan atau menggambarkan rincian proses pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga penyusunan standar biaya tidak menimbulkan duplikasi aktivitas dan pemborosan sumber daya.

5.2.2. Pengembangan standar biaya khusus pengujian sampel

Pengembangan standar biaya khusus BPOM dengan pendekatan *activity-based costing* dapat dikembangkan beberapa kemungkinan baik berdasarkan restrukturisasi aktivitas maupun pendekatan hubungan tata kerja pengujian sampel sebagai berikut:

- Standar biaya khusus disusun berdasarkan aktivitas yang seragam terstruktur dan mencerminkan tahap-tahap kegiatan.

- Standar biaya khusus disusun berdasarkan aktivitas dalam tingkat pengujian di tingkat Balai/Balai Besar POM;
- Standar biaya khusus disusun berdasarkan pendekatan hubungan tata kerja dan aktivitas dalam tingkat pengujian di tingkat Nasional yang dibedakan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu;
 - ⇒ Pengujian sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) evaluasi metodologi;
 - ⇒ Pengujian sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) uji absah;